

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 6.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan, proses dan output yang dihasilkan oleh studi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep  $\sigma$ -convergence yang merupakan analisis statis ternyata mendapatkan justifikasi melalui data perekonomian regional Indonesia pada periode 1993-1996 dan periode 2002-2005. *Cross sectional dispersion* mengalami penurunan yang konstan dan moderat pada periode tersebut.
2. Hasil yang serupa dapat dinyatakan terkait eksistensi  $\beta$ -convergence, baik *absolute* maupun *conditional* pada kedua periode.
3. Tingkat konvergensi yang tinggi yang dihasilkan melalui model *absolute convergence* menjadi indikator rendahnya *technological progress* dalam sebuah perekonomian (dalam hal ini Indonesia). Sedangkan tingkat konvergensi yang dihasilkan melalui model *conditional* mengindikasikan berbagai determinan pertumbuhan yang secara signifikan mempengaruhi konvergensi suatu perekonomian.
4. Pada periode 1993-1996, *absolute convergence* terjadi dengan kecepatan 1.01% per tahun. Setelah disertakan variabel *Grants* yang merubah model menjadi *conditional convergence*, kecepatan meningkat menjadi 1.34% per tahun. Implikasi logis dari nilai tersebut adalah *the half life of convergence* sekitar 68 tahun untuk analisis *absolute convergence* dan sekitar 51 tahun untuk analisis *conditional convergence*. Sehingga dapat dinyatakan terjadi percepatan konvergensi sebesar 25% per tahun sebagai akibat dari intervensi pemerintah melalui *intergovernmental transfer* yang berupa *Grants*.
5. Sedangkan pada periode 2002-2005, *absolute convergence* terjadi dengan kecepatan 1.87% per tahun. dan setelah variabel DP disertakan dalam model yang kemudian berubah menjadi *conditional convergence*, kecepatan meningkat 37.8% dan didapatkan kecepatan yang baru sebesar 3.04% per tahun. Konsekuensinya, terjadi pengurangan *the half life of convergence* yang semula sekitar 37 tahun (untuk analisis *absolute convergence*) menjadi sekitar 23 tahun (untuk analisis *conditional convergence*). Kesimpulan yang terus bergulir akhirnya menyatakan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal yang dieksekusi oleh variabel DP mendapatkan justifikasi dalam hal memperbaiki disparitas

karena berhasil meningkatkan kecepatan konvergensi (relatif terhadap analisis *absolute convergence* pada periode yang sama) sebesar 37.8% per tahun.

6. Secara absolut maupun relatif, variabel DP yang menggambarkan kebijakan fiskal yang baru menghasilkan performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan variabel *Grants*, yang merupakan produk kebijakan 'lama'. Maka dapat disimpulkan selanjutnya bahwa kebijakan otonomi daerah yang salah satu outputnya adalah Dana Perimbangan dapat diklaim memberikan pengaruh positif yang lebih besar dalam upaya mengurangi disparitas antar provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, tuntutan keadilan dan pemerataan pasca reformasi melahirkan kebijakn Otonomi Daerah mendapatkan jawaban melalui kinerja DP yang secara empiris menghasilkan percepatan pemerataan antar daerah.

7. Pemerintah memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Melalui studi ini, dapat dinyatakan bahwa kebijakan fiskal yang tepat dapat menghasilkan efek positif yang signifikan terhadap pemerataan pendapatan antar daerah.

## 6.2 Rekomendasi

Terlepas dari banyaknya keterbatasan yang melekat dalam studi ini, beberapa rekomendasi sederhana yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat eksistensi *absolute convergence* yang cukup tinggi yang mengindikasikan rendahnya *technological progress* yang jika dibiarkan dapat mengakibatkan stagnasi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, maka menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk memperbaiki tingkat penggunaan teknologi sekaligus pemerataannya demi menuju pembangunan yang berkelanjutan.
2. Terkait dengan penggunaan teknologi yang secara luas masih dinyatakan bukan barang publik, (karena biasanya bersifat *non-rivalry* dengan adanya konsep *property right* yang terlalu *rigid*) menjadi suatu hal yang krusial untuk dapat memformulasikan sebuah sistem *property right* yang tidak terlalu menghalangi difusi teknologi (yang berdampak positif bagi perekonomian) di satu sisi, namun tidak menghasilkan dis-insentif bagi para 'pencetus' ide dan gagasan di sisi yang lain.
3. Teknologi yang secara luas didefinisikan sebagai ide dan gagasan yang baru sangat terkait dengan *R&D* yang selanjutnya terkait dengan dunia pendidikan dan dunia usaha. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, tingkat pendidikan yang semakin baik akan menghasilkan modal manusia yang dapat menghasilkan ide dan gagasan yang lebih baik secara kualitas dan kuantitas. Dari sinilah didapatkan justifikasi intervensi pemerintah

dalam dunia pendidikan yang akan bermuara pada meningkatnya kinerja perekonomian. Perhatian yang lebih pada *investment on education* masih menjadi tuntutan yang relevan untuk diperjuangkan.

4. Kualitas SDM yang baik akan menghasilkan *positive spillover effects* bagi perekonomian. Secara lebih mendalam, *supply* ide dan gagasan sangat identik dengan dunia akademisi. Sedangkan *demand* sekaligus eksekutor ide dan gagasan sangat terkait dengan dunia usaha. Masalah yang sering timbul adalah "*missing link*" yang seringkali 'memisahkan' keduanya. Dunia akademis Indonesia yang sangat identik dengan minimnya dana riset serta publikasi yang berkolaborasi dengan minimnya keterlibatan dengan dunia usaha dapat menjadi penghambat *technological progress* di negeri ini. Untuk itu, pemerintah dengan berbagai kewenangan, kekuatan dan legalitasnya diharapkan dapat menjadi mediator antara keduanya sehingga terjadi sinergisitas positif yang dapat membangun perekonomian bangsa.

5. Formulasi kebijakan fiskal yang bersumber pada kekhasan karakteristik daerah (bukan kebijakan one fits all yang kurang berdasar) diharapkan menjadi kebijakan populis yang memberikan efek positif bagi pemerataan antar daerah.

### **6.3 Keterbatasan Studi**

Sebagai output dari input yang terbatas, studi ini sudah tentu memiliki banyak keterbatasan. Beberapa kekurangan dan kelemahan terdapat dalam studi ini, yang selanjutnya diharapkan dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Rentang waktu penelitian yang sangat singkat pada setiap periodenya menyebabkan penggambaran yang sangat mungkin tidak secara komprehensif menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia yang diinginkan. Hal ini terkait dengan keterbatasan akses serta kualifikasi penulis dalam pengumpulan dan pengolahan data.
2. Selain rentang waktu yang singkat, studi ini juga tidak melibatkan seluruh provinsi dalam proses pengolahan data. Penyebab yang sama melatarbelakangi keadaan tersebut, yaitu keterbatasan akses dan kualifikasi pribadi dari penulis.
3. Studi ini dapat menjelaskan pengaruh transfer antar level pemerintahan secara menyeluruh dalam dua periode yang telah dijelaskan, namun tidak dapat menjelaskan pengaruh dari subtransfer antar level pemerintahan dalam dua periode tersebut, seperti pengaruh variabel penerimaan pembangunan, sumbangan dan bantuan atau pengaruh Dana

Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak secara individu terhadap konvergensi selama dua periode tersebut.

4. Pada era Otonomi Daerah, motor dan eksekutor utama berbagai kebijakan lebih cenderung berada pada level kabupaten/kota dibandingkan dengan level provinsi. Pada periode 2002-2005, studi ini hanya menjadikan provinsi sebagai objek penelitian, sehingga kurang menggambarkan realita yang terjadi di lapangan beserta berbagai deviasi yang mungkin terjadi.

